

UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII Kabupaten Aceh Barat

Jalan Swadaya Lrg Gleh Hatee, Gampong Drien Rampak, Meulaboh 23617 081269011970

<https://samsatmeulaboh.acehprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Aceh / UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII

Kabupaten Aceh Barat

Pendaftaran Kendaraan Ganti Warna

No. SK : 973/079/2021

Persyaratan

1. a. Identitas diri: 1) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP/SIM/Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; 2) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; 3) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
2. b. Mengisi formulir permohonan
3. c. STNK Asli dan SPKS Asli;
4. d. Bukti pembayaran atau keterangan Lunas Pajak;
5. e. Surat Keterangan dari Bengkel/Karoseri yang merubah warna;
6. f. Sukti hasil pemeriksaan eek fisik kendaraan bermotor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII Kabupaten Aceh Barat

Jalan Swadaya Lrg Gleh Hatee, Gampong Drien Rampak, Meulaboh 23617 081269011970

<https://samsatmeulaboh.acehprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Aceh / UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII
Kabupaten Aceh Barat

Image not found or type unknown



1. a. Layanan Formulir, pemilik kendaraan melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan;
2. b. Layanan Cek Fisik: Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar.
3. c. Pemilik Kendaraan Bermotor diarahkan ke Polda/Polres untuk pendaftaran SPKS;
4. d. Pendaftaran: Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blangko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah didapatkan dari bagian SPKS ke bagian pendaftaran untuk diteliti.
5. e. Entry Data, Pokja Progresif dan Penetapan: Melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen kendaraan bermotor (memeriksa dokumen kendaraan bermotor untuk objek progresif dari wajib pajak pada database (untuk menentukan urutan kepemilikan), menginformasikan dan menetapkan besarnya PKB, BBNKB serta SWDKLLAJ).
6. f. Pembayaran dan Penyerahan; Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB (STNK dan TNKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor serta SWDKLLAJ sesuai dengan informasi pada formulir yang diambil dari [Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor serta SWDKLLAJ](#) sesuai dengan halaman asli. Pemilik Kendaraan Bermotor menerima Surat Tanda Nomor Kendaraan

UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII Kabupaten Aceh Barat

Jalan Swadaya Lrg Gleh Hatee, Gampong Drien Rampak, Meulaboh 23617 081269011970

<https://samsatmeulaboh.acehprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Aceh / UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII

Kabupaten Aceh Barat

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII Kabupaten Aceh Barat

Jalan Swadaya Lrg Gleh Hatee, Gampong Drien Rampak, Meulaboh 23617 081269011970

<https://samsatmeulaboh.acehprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Aceh / UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII
Kabupaten Aceh Barat

Tidak dipungut biaya

a. Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1) Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK):

a) Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3:

(1) Baru sebesar Rp100.000,-

(2) Perpanjangan sebesar Rp100.000,-

b) Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih:

(1) Baru sebesar Rp200.000,-

(2) Perpanjangan sebesar Rp200.000,-

b. Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:

1) Tarif Sepeda Motor:

a) Sepeda motor 50 cc ke bawah sebesar Rp3.000,-

b) Sepeda motor 50-250 cc sebesar Rp35.000,-

c) Sepeda motor 250 cc ke atas sebesar Rp83.000,-

2) Tarif Mobil Bukan Angkutan Umum:

a) Pick up, Stwg, sedan & jeep s.d. 2400cc sebesar Rp143.000,-

b) Bus & Micro Bus sebesar Rp153.000,-

c) Truck, tangki, gandengan 2400 cc ke atas sebesar Rp163.000,-

d) Ambulans, Jenazah & PMK sebesar Rp3.000,-

3) Tarif Mobil Angkutan Umum:

a) Mobil Penumpang s.d. 1600 cc sebesar Rp73.000,-

b) Bus & Micro Bus 1600 cc ke atas sebesar Rp90.000,-

4) Tarif Mobil Derek dan sejenisnya sebesar Rp23.000,-

UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII Kabupaten Aceh Barat

Jalan Swadaya Lrg Gleh Hatee, Gampong Drien Rampak, Meulaboh 23617 081269011970

<https://samsatmeulaboh.acehprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Aceh / UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII
Kabupaten Aceh Barat

Produk Pelayanan

1. a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); b. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB); c. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, PNBP dan SWDKLLAJ; d. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); e. Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.

Pengaduan Layanan

- a. Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLAJ dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
- b. Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat- lambatanya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).